

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam upaya pembangunan suatu negara. Keberhasilan pembangunan akan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan jumlah penduduk yang memainkan peran penting dalam upaya pembangunan. Keberadaan sumber daya manusia dan penyebarannya berdampak signifikan pada berbagai aspek yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek, termasuk sosial, budaya, dan lingkungan. Kondisi ini dapat menimbulkan beragam masalah sosial yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Sumber daya manusia yang jumlahnya tidak terkendali akan menimbulkan tantangan seperti meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat, berkurangnya ketersediaan lahan, serta terganggunya keseimbangan sumber daya alam (Kurniawan, 2017).

Pembangunan idealnya dapat dimulai dengan pembangunan keluarga yang menjadi unit terkecil dalam sistem masyarakat. Keluarga menjadi lembaga pertama yang menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam hidup bermasyarakat untuk membentuk karakter pada generasi selanjutnya (Lado et al., 2022). Beberapa studi terdahulu mengungkapkan bahwa keluarga memiliki peran yang besar dalam melahirkan generasi yang sehat dan menciptakan generasi yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara. Masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menerapkan fungsi-fungsi keluarga, mengakibatkan permasalahan yang kompleks, seperti kemiskinan, masalah kesehatan, kriminalitas, tingkat pendidikan penduduk yang rendah, serta rendahnya kualitas hidup pada remaja (Warjiman et al., 2022).

Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional menjadi lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab mengembangkan serta menggencarkan program keluarga berencana. Program tersebut tidak hanya memerhatikan pasangan suami istri dan balita, tetapi seluruh bagian dari penduduk, yaitu remaja dan lansia. Hingga saat ini, BKKBN mengembangkan

program kampung KB. Keberadaan kampung KB ini sudah tersebar ribuan di seluruh Indonesia. Kampung yang dapat memenuhi kriteria untuk menjadi kampung KB harus memiliki tingkat kesejahteraan kampung di atas rata-rata keluarga pra-sejahtera tingkat 1 (miskin) di tingkat desa atau kelurahan yang menjadi lokasi kampung tersebut (Zuhriyah et al., 2017).

Salah satu kampung Keluarga Berencana (KB) berada di Desa Haurkuning, Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kampung KB bernama kampung KB Hegarmanah yang diresmikan pada tahun 2017. khususnya di Dusun Manis untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kesejahteraan keluarga. Hal tersebut sesuai dengan tujuan umum program Kampung KB yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk melalui program-program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Program-program penunjang sangat diperlukan untuk mengimplementasikan Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) yang dapat menuju Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS).

Pemberian nama kampung KB Hegarmanah merupakan hasil musyawarah warga setempat yang diinisiasi oleh Ketua Kampung KB. “Hegarmanah” berasal dari dua suku kata, “*hegar*” yang berarti perasaan bahagia, sedangkan “*manah*” yang dalam bahasa sunda berarti hati atau perasaan manusia. Nama kampung KB Hegarmanah menjadi representasi dari komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan sejahtera.

Saat ini kampung KB Hegarmanah mengaitkan program-programnya dengan 8 fungsi keluarga. Upaya tersebut tentu dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memenuhi fungsi-fungsi keluarga yang terdiri dari fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi lingkungan. Keberadaan fungsi-fungsi keluarga juga seharusnya dapat menjadi acuan serta pedoman pola hidup yang ideal bagi keluarga agar dapat mewujudkan keluarga Bahagia dan sejahtera (Wijayanti & Berdame, 2019).

Latar belakang tersebut menunjukkan urgensi implementasi program KB kaitannya dengan fungsi keluarga di kampung KB untuk pengelolaan penduduk dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Peran pihak-pihak yang terlibat juga mempengaruhi keberhasilan implementasi yang dilakukan oleh masyarakat Kampung KB Hegarmanah. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **Implementasi Program Keluarga Berencana Kaitannya dengan Fungsi Keluarga di Kampung KB Hegarmanah Desa Haurkuning Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi program Keluarga Berencana kaitannya dengan fungsi keluarga pada masyarakat Kampung KB Hegarmanah Desa Haurkuning Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan?
- 2) Bagaimana peran serta masyarakat dan stakeholder dalam implementasi program KB kaitannya dengan fungsi keluarga di kampung KB Hegarmanah Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan?

1.3 Definisi Operasional

A. Implementasi

Implementasi adalah rangkaian kegiatan dalam yang mengantarkan kebijakan-kebijakan kepada masyarakat yang dapat membawa hasil seperti yang diharapkan. Rangkaian kegiatan yang menjadi wujud implementasi mencakup, persiapan seperangkat peraturan yang menjadi interpretasi kebijakan. Kedua, menyiapkan sumber daya yang akan berfungsi dalam menunjang proses implementasi. Ketiga, proses mewujudkan kebijaksanaan tersebut secara kongkrit ke masyarakat (Syaukani, 2016:295).

Implementasi merupakan upaya, perbuatan, dan Tindakan untuk merealisasikan rencana-rencana menjadi bentuk kegiatan atau produk yang nyata supaya dapat mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan

tahap yang dilakukan setelah perencanaan. Lebih dari sekedar perencanaan, dalam implementasi juga terdapat keterlibatan dengan pengaturan strategi yang matang dan siap untuk dilakukan eksekusi, sumber daya yang cukup, serta pengawasan yang berkelanjutan (Sulistyorini, 2022).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi bukan sekedar kegiatan atau aktifitas tertentu, melainkan wujud dari suatu perencanaan yang tersusun dan merupakan hasil dari suatu kebijakan. Rencana atau kebijakan tersebut biasanya telah disesuaikan dengan keputusan bersama serta disesuaikan dengan norma tertentu di masyarakat. Implementasi juga tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh objek lainnya. Maka dari itu implementasi dianggap sebagai suatu proses yang dinamis karena seluruh pelaksana kebijakan melakukan suatu kegiatan yang diharapkan dapat sesuai dengan tujuan serta sasaran tertentu dari kebijakan itu sendiri.

B. Program

Program merupakan hasil dari perencanaan yang berisi serangkaian kegiatan berdasarkan perencanaan yang didasarkan pada data yang valid dan memadai untuk mencapai tujuan dan rencana yang telah disusun. Tentunya, tujuan dan rencana yang dimaksud memiliki tujuan tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan program (Robbins et al., 2015).

Program merupakan segala sesuatu atau strategi yang dijalankan oleh seseorang dengan harapan dapat menghasilkan ketercapaian tertentu. Dari definisi tersebut, rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang berupa pelaksanaan kegiatan, didukung dengan kebijakan, prosedur serta sumber daya yang mendukung keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

C. Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana merupakan upaya dan langkah masyarakat dalam mengintegrasikan segenap potensi masyarakat lainnya untuk senantiasa berpartisipasi dalam melembagakan, melahirkan serta membiasakan NKKBS dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya

manusia (Warjiman et al., 2022). Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga menjelaskan bahwa Keluarga Berencana merupakan upaya mengatur dan merencanakan kelahiran anak, jarak kelahiran anak serta usia ideal untuk melahirkan. Pengaturan kehamilan tersebut dilakukan melalui promosi, perlindungan serta bantuan yang disesuaikan dengan hak reproduksi agar terwujudnya keluarga yang berkualitas.

Keluarga berencana saat ini menjadi program pemerintah yang telah dinaungi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Fungsi BKKBN yaitu sebagai perencana, pelaksana, pengkoordinasi, pengawas dan evaluasi kebijakan. Keluarga berencana merupakan sarana bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani, karena pada dasarnya kesejahteraan merupakan hak setiap orang.

D. Fungsi Keluarga

Fungsi keluarga memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya meliputi internal keluarga yang ada di lingkungan rumah, tetapi juga meliputi interaksi-interaksi yang terjadi secara dinamis oleh anggota keluarga dengan lingkungan di sekitar rumah (Ramadia, 2023).

Fungsi keluarga adalah peran dan tanggung jawab yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, atau pengangkatan anak. Keluarga berfungsi sebagai kesatuan dasar masyarakat; Memenuhi berbagai kebutuhan anggotanya, meliputi kebutuhan fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Keluarga adalah poin penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Menurut Warjiman (2022), Fungsi keluarga, terdiri dari:

1. Fungsi keagamaan,
2. Fungsi sosial budaya,
3. Fungsi cinta kasih,
4. Fungsi perlindungan,

5. Fungsi reproduksi,
6. Fungsi sosial dan pendidikan,
7. Fungsi ekonomi,
8. Fungsi pembinaan lingkungan

E. Kampung KB

Kampung KB didefinisikan sebagai satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat. Kampung KB merupakan salah satu program strategis yang merupakan implementasi praktis Program. Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Kampung KB yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang mengaitkan keterpaduan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan beberapa sektor pembangunan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia (BKKBN, 2022).

Menurut Fitriyani (2021), kampung KB merupakan sebuah kebijakan yang disusun oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi warga negara melalui berbagai pemberdayaan. Melalui Kampung KB diharapkan masyarakat mampu mendorong masyarakat untuk mempunyai jumlah anak yang cukup sehingga dapat memberikan pengasuhan dan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Selain itu, Kampung KB bertujuan untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan swasta dalam mendorong, mendukung, dan mengembangkan masyarakat dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana dan lainnya.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Mengetahui bentuk implementasi program KB di kampung KB Hegarmanah.

2. Menganalisis keterkaitan antara implementasi program kampung KB dengan pelaksanaan fungsi keluarga di kampung KB Hegarmanah.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang penulis susun diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat bagi dunia akademisi khususnya dan masyarakat umum pada umumnya.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini berguna dalam memberi gambaran mengenai implementasi program kampung KB dalam kaitanya dengan fungsi keluarga di lingkungan masyarakat desa Haurkuning.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan serta evaluasi bagi pihak – pihak yang berkaitan, khususnya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Kuningan dan BKKBN dalam melaksanakan program – programnya.

- b. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penerapan fungsi keluarga dalam program Keluarga Berencana untuk meningkatkan kualitas masyarakat serta dalam upaya pengendalian jumlah penduduk.

- c. Manfaat Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi acuan serta referensi untuk penelitian selanjutnya.